

Unusa Ajak Masyarakat Tekan Angka Stunting

30 Agustus 2019



CEGAH STUNTING : Dosen Unusa memberikan penyuluhan tentang kurang gizi kepada ibu-ibu di Pamekasan Madura. DUTA/jistimewa

Stunting atau gizi buruk masih menghantui negeri ini. Di pelosok-pelosok daerah, penderita masih banyak dijumpai. Karena itu peran serta masyarakat sangat penting untuk mendeteksi dan tentu saja menekan angka kejadian. Dan campur tangan pihak lain terutama akademisi juga sangat dibutuhkan, karena pemerintah tidak akan mampu menanggulangi jika sendirian.

—

OTONOMI desa telah dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur perkembangan dan pembangunan masyarakat desa.

Undang-undang tersebut menjadi dasar yang menjelaskan kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa (1).

Otonomi Desa semakin diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri melalui dana desa untuk penyusunan program.

Sebelumnya sumber dana operasional desa hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, alokasi APBN, Alokasi Dana Desa, Bagian dari DPRD Kab/Kota, Bantuan keuangan dari APBD, hibah/sumbangan dari pihak ketiga dan sumber dana sah lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Pemerintah desa juga dituntut untuk meningkatkan perhatian pada aspek kesehatan masyarakat sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang memprioritaskan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di desa.

Desa Murtajih merupakan salah satu desa di Kabupaten Pamekasan. Masalah kesehatan di Pamekasan menjadi perhatian penting. Dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2013 sebesar 0.5874, meningkat dari sebelumnya yaitu 0,4158 pada 2007.

Namun perolehan IPKM tersebut paling rendah dibandingkan dengan IPKM 37 Kab/Kota di Provinsi Jawa timur bahkan dibandingkan 3 Kab/Kota di Pulau Madura. (3). Pengentasan masalah kesehatan di Desa Murtajih memerlukan perhatian serius dari pemerintahan desa melalui adanya program intervensi.

Melihat kondisi tersebut, Tim dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Balai Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan awal bulan lalu.

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Unusa, Agus Aan Adriansyah, S.KM., M.Kes. mengungkapkan, masalah kesehatan di Desa Murtajih didominasi oleh masalah kesehatan gizi pada ibu hamil maupun anak, masalah KIA dan penyakit menular. Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling lama ada di Desa.

"Namun tingkat kehadiran masyarakat di Desa Murtajih ke Posyandu di Tahun 2017 hanya sebesar 37, 97%," ungkapnya, Jumat (30/8).

Kegiatan ini adalah kegiatan kedua yang didasari dari hasil diskusi analisis kebutuhan dan FGD terkait perencanaan berbasis bukti dibidang kesehatan bersama para kader kesehatan, bidan desa, bidan puskesmas dan aparat Desa Murtajih yang dilakukan pada awal bulan lalu.

Selain stunting, Tim Dosen UNUSA juga membahas perihal pentingnya melakukan imunisasi untuk mencegah dan mengetahui status kesehatan anak apakah anak mereka sehat ataupun tidak. Imunisasi juga menjadi salah satu cara mengetahui apakah anak mengalami stunting.



*Diskusi di sela-sela sosialisasi agar semua pihak agar memahami pentingnya memberantas stunting.
DUTA/istimewa*

"Coba, kalau bapak ibunya gak bisa mengantar karena sibuk bekerja. Minta tolonglah ke anggota keluarga misal ke nenek, kakek, bude, atau pembantu (jika ada) untuk mengantar buah hati ke posyandu. Misal, saya sendiri dengan istri dengan terpaksa gak bisa mengantar, kami minta tolong ke pembantu untuk mengantar si kecil ke posyandu" ujar Aan selaku ketua Tim Pengmas Unusa.

Kegiatan ini diikuti oleh para ibu-ibu kader kesehatan desa Murtajih, yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Salah satu ibu kader memaparkan kalau tidak berani memeriksakan anak ke posyandu karena banyak anak yang sakit setelah diperiksakan. "Ini saya pernah ke posyandu dan imunisasi anak, lalu setelah itu anak saya panas demam," ujar Tumina

Aan menambahkan, memang setelah imunisasi, terkadang si kecil mengalami demam. Hal ini dikarenakan tubuh membentuk sistem kekebalan tubuh baru hasil gabungan dari vaksin imunisasi yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga menyebabkan suhu tubuh meningkat (demam).

"Makanya setelah imunisasi biasanya si kecil sering panas. Namun, tidak semua imunisasi memberikan respon demam, dan juga tidak semua anak menunjukkan respon demam karena respon tiap anak itu berbeda-beda," ucap Aan.

Aan menambahkan bahwasannya kalau tak mau si kecil panas setelah imunisasi, ibu-ibu langsung siapkan parasetamol sirup, buat jaga-jaga saja.

Kegiatan ini akan ditindak lanjuti lagi pada saat posyandu yang akan dilakukan secara serentak pada bulan agustus mendatang bersamaan dengan adanya kegiatan Bulan Timbang.

Di sana akan dilakukan pengambilan data serta melakukan konseling kepada para ibu yang membawa balita ke Posyandu serta kepada para ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil. **rud/ril**
